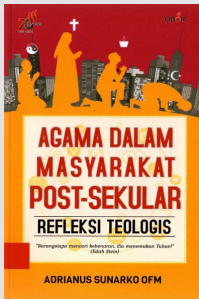


RESENSI BUKU 4

AGAMA DALAM MASYARAKAT POST-SEKULAR: REFLEKSI TEOLOGIS



Pengarang	: Adrianus Sunarko, OFM
Judul Buku	: Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis
Editor	: Yon Lesek dan Savio Marianus
Tempat	: Jakarta
Penerbit	: Penerbit OBOR
Tahun Terbit	: 2019
Jumlah Halaman	: XV dan 79 Halaman
ISBN	: 978-979-565-859-7
Peresensi	: Sandi Alang Patanduk ¹

Informasi Awal

Buku *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis* karya Adrianus Sunarko yang diedit oleh Yon Lesek dan Savio Marianus diterbitkan di Jakarta pada tahun 2019 oleh Penerbit OBOR (Anggota IKAPI dan Anggota SEKSAMA). Buku ini merupakan pidato yang disampaikan dalam sidang terbuka senat dosen STF Driyarkara pada 11 Mei 2019 dalam rangka pengukuhan Adrianus Sunarko sebagai Guru Besar di bidang Teologi. Jumlah halaman buku ini ialah xv dan 79 halaman, yang terdiri dari xv halaman pembuka (daftar isi, kata pengantar dan pendahuluan), 70 halaman isi, 9 halaman penutup (daftar rujukan).

¹ Mahasiswa Pascasarjana STFT INTIM di Makassar.

Pengantar Umum

Melalui buku *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis* karya Adrianus Sunarko mengajak pembaca untuk memikirkan secara kritis dan berefleksi tema yang mendesak di zaman ini yakni mengenai posisi dan peran agama dalam masyarakat post-sekular. Melalui buku ini Adrianus Sunarko memulai dengan memaparkan mengenai modernisasi yang secara khusus merujuk pada masa pencerahan di abad ke-17 dan ke-18 dimana ilmu pengetahuan sangat dijunjung tinggi dan meragukan ketuhanan.² Untuk menjabarkan lebih jauh mengenai modernisasi yang memicu sekularisasi, Adrianus Sunarko mengutip pandangan Jose Casanova mengenai sekularisasi dalam masyarakat yang mencakup beberapa aspek yaitu: (a) adanya perbedaan ranah sekular dari institusi dan norma agama; (b) kepercayaan terhadap praktik agama menurun; dan (c) agama menjadi sesuatu yang diprivatisasikan³.

Modernisasi dan sekularisasi memunculkan pluralisasi dimana kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh norma-norma agama, negara atau politik dipisahkan dari agama, negara bersikap netral terhadap doktrin agama, ruang publik dikosongkan dari praktik mengekspresikan agama dan posisi agama yang sebelumnya bersikap publik di tarik ke ruang privat. Adrianus Sunarko juga mengemukakan bahwa budaya modern membawa sebuah pola pikir yang penting yang mengandung berbagai nilai positif yakni paradigma martabat manusia universal yang menjunjung tinggi kesamaan semua orang sebagai manusia, penghormatan terhadap HAM, kebebasan beragama dan lain-lain.⁴ Salah satu hal yang dikritik mengenai modernisasi ialah prediksi bahwa agama tidak akan relevan lagi namun faktanya pada abad

² Adrianus Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis* (Jakarta: Penerbit OBOR, 2019), 1.

³ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 3.

⁴ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 5–6.

ini agama masih eksis dan kembali menjadi isu publik bahkan turut menentukan kebijakan publik. Perkembangan baru inilah yang kemudian disebut dengan post-sekular.⁵

Post-sekular kemudian menuntut agama untuk menyatakan posisi dan peran yang tepat di ruang publik dan kemudian agama dalam dilema antara liberalisme dan komunitarian. Bagi kaum liberalisme, agama adalah urusan privat dan persoalan politik harus dijalankan seolah Allah tidak ada (*Etsi Deus non daretur*) sehingga kaum liberal mengusung sikap netral. Sedangkan kaum komunitarian berpendapat bahwa manusia secara nyata selalu terikat dengan latar belakang budaya, etnis dan agama tertentu sehingga tuntutan netral oleh kaum liberal bersikap abstrak.⁶ Adrianus Sunarko kemudian mengutip apa yang disampaikan Habermas untuk menjembatani dilema agama dalam menentukan posisi dan peran di ruang publik. Habermas berpendapat bahwa realita bahwa aspirasi dan partisipasi warga negara dalam sebuah negara demokrasi bersumber dari imannya tetapi fakta bahwa manusia juga memiliki akal budi yang menjadi dasar pemisahan gereja dan negara.⁷

Sebagai seorang Katolik, Adrianus Sunarko menjabarkan posisi Gereja Katolik mengenai peran agama di ruang publik dalam kaitan menentukan “posisi epistemis”⁸ sekaitan dengan tiga fakta yakni pluralitas agama dan pandangan hidup, otoritas ilmu pengetahuan, dan prinsip dalam dunia politik yang berdasarkan akal budi dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Adrianus Sunarko menambahkan bahwa Gereja Katolik telah menjadi “post-sekular” paling tidak sejak Konsili Vatikan II dimana para bapa konsili telah berdebat hangat mengenai persoalan tersebut dan menghasilkan berbagai dokumen.⁹

⁵ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 7,9.

⁶ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 24-25,28.

⁷ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 37-38.

⁸ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 44-45.

⁹ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 49.

Pada akhirnya, Adrianus Sunarko mengemukakan bahwa agama-agama harus menyadari bahwa proses terbuka untuk belajar harus lahir dari dalam dinamika agama itu sendiri dan tidak bertentangan dengan identitasnya, dalam proses itulah filsafat dan teologi memainkan peran penting tetapi pada akhirnya praksis iman jemaatlah yang menentukan¹⁰ sebab proses beriman dan beragama tidak hanya tentang doktrin semata tetapi memiliki pengaruh secara holistik bagi seorang beragama.¹¹

Gagasan Penulis

Thesis Statement

Post-sekularisme merupakan kondisi di mana agama-agama kembali memasuki ruang publik tetapi bukan untuk mendominasi melainkan sebagai wadah bagi umat beragama mengungkapkan hasil refleksi mereka dalam bahasa religius, keterbukaan untuk saling belajar sehingga dapat menempatkan diri serta memberi peran yang tepat dalam negara demokratis.

Gagasan Utama

Dalam buku *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, Adrianus Sunarko menulis bahwa tantangan terbesar di zaman post-sekular adalah agama yang kembali ke ruang publik perlu menentukan peran agar tidak terjatuh kembali pada posisi radikal. Untuk mencegah hal tersebut maka kaum beragama diharapkan bersedia untuk berkomunikasi dan berdialog secara kritis agar dapat saling belajar dan memahami keterbatasan masing-masing, namun tetap mempertahankan keunikan atau identitasnya sehingga tidak ada fanatisme agama.¹² Adrianus Sunarko menulis juga bahwa agama dapat memberi sumbangsih positif bagi demokrasi dan menguatkan solidaritas dalam masya-

¹⁰ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 45.

¹¹ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 27.

¹² Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 10,12.

arakat. Di Indonesia, konsep mengenai post-sekular telah digumuli di masa awal kemerdekaan dan menghasilkan Pancasila. Perdebatan di antara para pendiri bangsa memungkinkan kita mewarisi dasar negara yang membuka ruang bagi agama di ranah publik tanpa terjebak teokrasi. Indonesia menjadi negara yang terpisah dari agama tetapi juga tidak menyatu dengan agama.¹³

Adrianus Sunarko dalam buku ini memaparkan mengenai posisi agama di ruang publik dan mengutip pendapat Habermas bahwa agama menjadi motivasi warga negara menyatakan kontribusi bagi negara tetapi negara tidak berada di bawah legitimasi agama.¹⁴ Karena itu, agama dituntut untuk terbuka, berdialog, saling belajar agar terbangun solidaritas warga dengan berbagai latar belakang agama dan budaya sehingga tercipta masyarakat demokrasi yang stabil. Agama tanpa kehilangan keunikannya, bersifat inklusif, saling menghargai dan mengakui martabat dan hak asasi manusia.¹⁵ Agama Kristen (khususnya Katolik) dalam masyarakat post-sekuler telah menentukan posisinya paling tidak melalui keputusan Konsili Vatikan II. Dokumen Konsili Vatikan II dalam kaitannya dengan agama-agama telah menjelaskan posisi Gereja Katolik yang menegaskan keyakinan dasar iman sebagai Kristen tetapi juga mengakui keyakinan lainnya. Mengenai otonomi dan otoritas ilmu pengetahuan, secara eksplisit terdapat dalam pengakuan Gereja Katolik yakni ditemukan dalam dokumen *'Gaudium et Spes'* dan dokumen *'Dei Verbum'*. Sedangkan mengenai sistem politik modern yakni sistem demokrasi dan pengakuan atas martabat serta hak asasi manusia, dokumen Konsili Vatikan II telah menuliskan tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, tuntutan politik modern yang menuntut sikap egaliter berhasil diintegrasikan ke dalam doktrin kekristenan. Mengenai relasi agama dan negara, dokumen ini juga

¹³ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 15–21.

¹⁴ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 38.

¹⁵ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 46,65.

merumuskan bahwa pemerintah atau negara wajib mengakui kehidupan beragama warga negara tetapi tidak boleh mencampuri terlalu jauh.¹⁶ Adrianus Sunarko menegaskan bahwa penemuan posisi epistemis dan rasionalitas iman tidak ada begitu saja melainkan lahir dari proses belajar yang panjang namun akhirnya yang menentukan adalah praksis iman dari jemaat.¹⁷

Analisis Struktur Buku

Buku *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis* karya Adrianus Sunarko memiliki struktur yang sistematis dalam menjabarkan mengenai peran agama dalam masyarakat post-sekular. Dalam bab pertama buku ini, Adrianus Sunarko memulai dengan memberi pertanyaan bagaimana menyebut zaman sekarang ini, Sunarko menyebutnya dengan post-sekular. Pada bagian ini, Adrianus Sunarko memaparkan mengenai perkembangan zaman akibat modernisasi yang mengakibatkan munculnya berbagai interpretasi terutama yang bersumber dari ilmu pengetahuan yang dikenal dengan zaman pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18. Pada bagian ini juga, Adrianus Sunarko memaparkan mengenai zaman yang disebut post-sekular yang dikutipnya dari istilah yang digunakan Jurgen Habermas. Selanjutnya, pada bab kedua Adrianus Sunarko membawa pembaca untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana peran agama dalam ruang publik: antara liberalisme dan komunitarian. Adrianus Sunarko menunjukkan kepada pembaca bahwa tantangan utama masyarakat post-sekular adalah bagaimana menentukan peran agama dalam ruang dengan menjabarkan beberapa pendapat tokoh diantaranya John Rawls, Joseph Ratzinger atau Benediktus XVI, Jurgen Habermas, dan Nicholas Wolterstorff. Pada bab ketiga, Adrianus Sunarko menjabarkan mengenai tuntutan pada agama dan peran teologi dalam menanggapi tuntutan di zaman post-sekular. Adrianus Sunarko memaparkan tiga “posisi epistemis”

¹⁶ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 49–56.

¹⁷ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 56, 58.

yang harus dimiliki oleh agama dalam masyarakat modern ini agar tidak jatuh pada posisi radikal dan eksklusif. Sekaitan dengan “posisi epistemis” tersebut, Adrianus Sunarko dalam bagian ini juga menjabarkan posisi kekristenan (Gereja Katolik) di zaman post-sekular. Kemudian di bab penutup, Adrianus Sunarko berbicara mengenai post-sekular di konteks Indonesia yang plural khususnya mengenai seruan Soekarno yakni prinsip normatif Pancasila. Adrianus Sunarko mengemukakan bahwa di Indonesia, agama-agama ditantang untuk belajar menjadi lebih berbudaya dan tidak menyepelkan kemanusiaan.

Evaluasi dan Refleksi Kritis

Buku *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis* karya Adrianus Sunarko menurut saya berhasil memberikan gambaran dan penjelasan mengenai zaman modern saat ini yang terus berkembang dan melahirkan berbagai interpretasi yang baru termasuk mengenai agama di ruang publik. Perkembangan zaman menuntut agama untuk menyatakan kehadiran dan posisinya serta kontribusinya bagi masyarakat di ruang publik. Dalam buku ini, Adrianus Sunarko menantang dan memanggil agama-agama untuk menjawab seruan post-sekular untuk berketuhanan dan berbudaya tanpa egoisme dari agama.¹⁸ Adrianus Sunarko menuliskan mengenai posisi ekstrem yang harus dihindari dalam rangka menentukan posisi teologi, yakni pertama posisi kaum fundamentalis yang menolak semua yang modern diantaranya hak asasi manusia serta kebebasan beragama. Kedua, mengubah dengan menyesuaikan wahyu dan iman untuk memenuhi tuntutan zaman modern.¹⁹ Menurut Adrianus Sunarko, agama pada saat bersamaan harus mempertahankan keunikan dalam dirinya yang menjadi identitas agama tersebut tetapi harus juga terbuka dan belajar serta

¹⁸ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 66.

¹⁹ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, 67.

menyadari keterbatasannya.²⁰ Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Paul F. Knitter dalam bukunya *Pengantar Teologi Agama-agama* bahwa kesadaran akan keragaman agama mendorong orang untuk mengatakan “tidak ada jalan satu-satunya bagi semua orang”.²¹ Kesadaran itulah yang dapat menjadi motivasi dalam mengadakan dialog mutual.

Mengenai proses saling belajar antaragama, Stella Y.E. Pattipeilohy dalam bukunya *Teologi Publik Asia Menurut Preman Niles: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Publik GPIB* menuliskan bahwa teologi publik adalah teologi yang saling belajar dengan umat lainnya serta bersama-sama menata hidup agar menjadi lebih baik sebab teologi publik adalah sebuah dialog kehidupan yang meskipun berasal dari kekristenan tetapi terbuka bagi yang lain.²² Dialog yang berdasarkan aksi nyata dan tindakan etis memungkinkan terciptanya perdamaian, keadilan dan integritas ciptaan adalah perjumpaan agama-agama yang mendesak dan utama.²³ Dengan demikian, apa yang Adrianus Sunarko kemukakan dalam buku ini yakni tuntutan mengenai posisi epistemis dapat terjawab dengan melaksanakan dialog agama-agama yang berdasar atas tindakan etis bersama-sama. Dengan dialog dan kerja sama, agama-agama dimungkinkan untuk mengakui dan menghargai fakta pluralitas di zaman modern, dan dengan ilmu pengetahuan serta akal budi menentukan tindakan etis bersama dan pada saat yang bersamaan pula kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh semua agama. Yewangoe juga berpendapat bahwa modernisasi adalah tantangan bagi agama-agama untuk paling tidak *survive* dan untuk memperhatikan nasib manusia yang tergradasi karena adanya perkembangan. Jika masalah kemanusiaan menjadi

²⁰ Sunarko, *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*, XV.

²¹ Paul F. Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 7.

²² Stella Y.E. Pattipeilohy, *Teologi Publik Asia Menurut Preman Niles: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Publik Asia* (Yogyakarta: Kanisius dan UKDW, 2019), 96, 137.

²³ Knitter, *Pengantar Teologi Agama-Agama*, 288–290.

perhatian bersama maka para penganut agama dengan bertolak dari pandangan imannya untuk bertemu dengan yang lain dan menjadikan kemanusiaan sebagai titik tolak serta sasaran tindakan bersama maka akan tercipta kedamaian. Hal ini bagi orang kristen juga adalah cara untuk melakukan amanat Allah untuk memelihara bumi dan menjalin persahabatan dengan sesama manusia yang merupakan *Imago Dei*. Selain itu, hal ini juga memungkinkan terjadinya peningkatan dalam pembangunan negara sebab agama-agama adalah pemberi landasan moral, etik dan spiritual pembangunan nasional.²⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Knitter, Paul F. *Pengantar Teologi Agama-Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Pattipeilohy, Stella Y.E. *Teologi Publik Asia Menurut Preman Niles: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Publik Asia*. Yogyakarta: Kanisius dan UKDW, 2019.
- Sunarko, Adrianus. *Agama dalam Masyarakat Post-Sekular: Refleksi Teologis*. Jakarta: Penerbit OBOR, 2019.
- Yewangoe, A.A. *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

²⁴ A.A Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 67, 84-85.